

## **Pemecatan Massal Tenaga Kesehatan RSUD Ogan Ilir:**

### **Bukti rawannya posisi tenaga medis**

Oleh Kevin Aprilio\*

Pada tanggal 22 Mei 2020, mencuat berita mengenai pemecatan 109 tenaga medis yang bertugas di RSUD Ogan Ilir, Sumatera Selatan<sup>1</sup>. Pemecatan ini dilakukan oleh bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam, setelah terjadinya pemogokan kerja yang dilakukan oleh berbagai tenaga medis di rumah sakit tersebut. Pemogokan ini dilandaskan oleh ketidakpuasan para tenaga medis atas fasilitas yang diberikan bagi mereka terkait pemenuhan kebutuhan mereka selama bekerja, seperti transparansi insentif, alat pelindung diri (APD) yang memadai, rumah singgah yang layak, dan sebagainya.

Selain menunjukkan berbagai mismanajemen publik Indonesia, terutama dalam bidang Kesehatan, hal ini menunjukkan bagaimana tenaga kesehatan berada dalam posisi lemah dalam daya tawarnya dalam pekerjaan. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan permasalahan lebih besar yang ditunjukkan oleh kasus pemecatan yang terjadi di Ogan Ilir, serta bagaimana peran aktor-aktor di dalamnya dalam mempengaruhi kejadian ini.

### **Politik dalam Dunia Kesehatan**

Sudah tidak mengherankan untuk kita melihat pengaruh politik terhadap dunia kesehatan. Sebagai contoh, penanganan COVID-19 yang berbelit-belit sudah cukup menunjukkan kurangnya koordinasi manajemen pemerintah dalam hal kesehatan serta manajemen rumah sakit itu sendiri dalam hal menangani pasiennya. Keberadaan kasus ini kembali lagi menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam penanganan COVID-19, mengingat pemecatan ini dilakukan terhadap mereka yang mengkritik insentif rumah sakit sebagaimana yang telah disebutkan di atas pada tenaga medis penanganan COVID-19. Meskipun diklaim oleh beberapa pihak<sup>2</sup> bahwa klaim yang diajukan tidak berdasar dan tuntutan yang dilayangkan mereka yang melakukan mogok kerja tidak berlandaskan, rasanya tidak sulit untuk mempercayai sisi lain mengingat seringnya kekurangan APD terjadi, bahkan di DKI Jakarta<sup>3</sup>.

Pemecatan ini dapat dikatakan tidak lain merupakan bentuk permasalahan pemerintah daerah—melalui bupati—yang berusaha mempertahankan kepentingannya<sup>4</sup>; dalam hal ini, *public image* mereka, dengan mengatakan bahwa pemecatan ini dilakukan karena kesalahan tenaga medis tersebut sendiri yang melakukan pemogokan, apapun alasannya.

### **Berlindung di balik Sumpah**

Salah satu alasan yang diberikan para pendukung keputusan ini, terutama dari pihak media<sup>5</sup>, adalah aspek etis dari pemogokan ini. Dalam hal ini, Sumpah Hippokratès—serta sumpah-sumpah lainnya yang diucapkan oleh berbagai profesi kesehatan—dijadikan senjata untuk menafikan pernyataan sikap para buruh, serta segala keresahan di dalamnya. Jika Anda

teliti, tentunya Anda mengerti bahwa tindakan tersebut merupakan kecacatan logika berupa *tu quoque*.

Permasalahan yang timbul, berbicara mengenai aspek etis mogoknya tenaga medis dalam kerjanya, sebenarnya dapat dijelaskan secara sederhana melalui Kode Etik Kedokteran Indonesia<sup>6</sup> (KODEKI). KODEKI menjelaskan secara gamblang bahwa dalam berupaya mengerjakan tugasnya, dokter harus “...memelihara kesehatannya supaya bisa bekerja dengan baik.” Kode Etik Keperawatan Indonesia<sup>7</sup> pun menyatakan hal yang sama dengan kewajiban perawat untuk “...memelihara kondisi kerja yang kondusif.” Meskipun penulis belum menemukan sumber resmi terkait kode etik Apoteker, dapat dideduksi bahwa mogok kerja merupakan bentuk pernyataan sikap yang valid oleh tenaga kesehatan dalam kondisi kerja yang tidak layak.

### **Masalahku Masalahmu**

Tindakan pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan upaya pemerintah untuk menggeser kewajibannya dalam pemenuhan lingkungan dan kondisi kerja yang layak—melalui pemenuhan APD dan fasilitas lainnya—pada para tenaga kesehatan secara individual. Para tenaga kesehatan diposisikan layaknya tenaga kerja paksa yang diharuskan bekerja dalam lingkungan yang tidak aman selagi pemerintah “bergoyang kaki” melupakan permasalahan yang terjadi.

Di sisi yang lain, nulifikasi pemerintah terhadap dampaknya mempertahankan ego pribadi melalui pemecatan ini<sup>8</sup> merupakan suatu hal yang patut ditertawakan. Data BPPDSMK Kemenkes<sup>9</sup> mencatat bahwa terdapat total 283 tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut. Terlepas apakah data ini termasuk tenaga honorer dan pekerja tidak tetap lain, serta apakah data tersebut sudah diperbarui dengan adanya kejadian ini atau belum, mengingat tidak adanya tanggal pembaruan terakhir data ini, pemecatan 109 tenaga kesehatan ini berarti RSUD

Ogan Ilir kehilangan antara 27.8% sampai 38.5% tenaga kesehatan yang bekerja di sana. Sebuah angka yang cukup besar, tentunya. Pertanyaannya, kenapa pemerintah baru mau berbagi permasalahan yang merugikan bagi mereka, sementara meninggalkan masyarakatnya dalam penderitaan?

### **Dua Belah Sisi?**

Meskipun IDI sejauh ini baru memberikan klarifikasi politisnya yang menjelaskan upaya advokasi dan mediasi oleh mereka, dan sampai tulisan ini dibuat belum ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai hasil advokasi dan mediasi tersebut, penulis berpendapat bahwa upaya media dan publikasinya untuk berusaha netral merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Dalam hal ini, menyandingkan opini dua pihak dengan ketimpangan kuasanya dan segala bentuk dukungan yang ada di belakangnya justru mengaburkan pendapat mereka yang memiliki posisi yang lemah.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa keberpihakan dalam memilih permasalahan ini merupakan hal yang penting dalam upaya menentukan pihak mana yang sebenarnya patut dibela. Keberpihakan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, oleh karenanya, jangan sampai kita tanpa sengaja berpihak pada orang yang salah dalam upaya menjadi “netral”.

### **Akhir Kata**

Dalam hubungan antar-manusia, politik merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karenanya, pemahaman politik yang baik, bahkan bagi kita yang berada di rumpun kesehatan, merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi sebuah pengantar singkat terhadap peliknya dunia politik.

Damai sejahtera bagi kita semua.

\*Kevin Aprilio merupakan mahasiswa Farmasi angkatan 2018 di Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran. Selain beraktivitas sebagai mahasiswa, ia juga merupakan kader aktif di LPPMD Unpad dan ayah bagi seekor kucing kuning.

### **Referensi**

- <sup>1</sup> Nursatria, A. (2020), 22 Mei. *Fakta 109 Tenaga Medis Di RSUD Ogan Ilir Dipecat, Berawal Dari Aksi Mogok Kerja*. Diambil dari Kompas.com di <https://regional.kompas.com/read/2020/05/22/05000021/fakta-109-tenaga-medis-di-rsud-ogon-ilir-dipecat-berawal-dari-aksi-mogok?page=all#page4> pada 22 Mei 2020.
- <sup>2</sup> Siregar, R. A. (2020), 22 Mei. *Disebut Tak Mau Tangani Pasien Corona, 109 Nakes di RSUD Ogan Ilir Dipecat*. Diambil dari detik.com di <https://news.detik.com/berita/d-5023257/disebut-tak-mau-tangani-pasien-corona-109-nakes-di-rsud-ogon-ilir-dipecat> pada 22 Mei 2020.
- <sup>3</sup> --. (2020), 02 April. *DKI Kekurangan APD dan Masker untuk Tenaga Medis*. Diambil dari CNN Indonesia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200401173443-20-489280/dki-kekurangan-apd-dan-masker-untuk-tenaga-medis> pada 22 Mei 2020.
- <sup>4</sup> Aprilio, K. (2020), 10 April. *Politik di balik Wabah SARS-CoV-2*. Diambil dari LPPMD Unpad di <https://www.lppmdunpad.com/2020/04/politik-di-balik-wabah-sars-cov-2.html> pada 22 Mei 2020.
- <sup>5</sup> --. (2020), 22 Mei. *Mogok Kerja, Ini Tuntutan Tenaga Medis RSUD Ogan Ilir*. Diambil dari Kompas.TV di <https://www.kompas.tv/article/82486/mogok-kerja-ini-tuntutan-tenaga-medis-rsud-ogon-ilir> pada 22 Mei 2020.

<sup>6</sup> Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. (2012). Kode Etik Kedokteran Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia.

<sup>7</sup> Persatuan Perawat Nasional Indonesia. --. Kode Etik Keperawatan Indonesia. Diambil dari website Persatuan Perawat Nasional Indonesia di [https://ppni-inna.org/doc/ADART/KODE\\_ETIK\\_KEPERAWATAN\\_INDONESIA.pdf](https://ppni-inna.org/doc/ADART/KODE_ETIK_KEPERAWATAN_INDONESIA.pdf) pada 22 Mei 2020.

<sup>8</sup> Nursatria, A. (2020), 22 Mei. *109 Tenaga Medis Dipecat, Bupati Ogan Ilir: Tidak Usah Masuk Lagi, Kita Cari yang Baru*. Diambil dari Kompas.com di <https://regional.kompas.com/read/2020/05/22/04000021/109-tenaga-medis-dipecat-bupati-ogan-ilir-tidak-usah-masuk-lagi-kita-cari?page=all#page3> pada 22 Mei 2020.

<sup>9</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. --. Data Fasyankes RS Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Diambil dari Badan PPSDM Kesehatan, Informasi SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di [http://bppsdmk.kemkes.go.id/info\\_sdmk/info/fasyankes?unit=1610003](http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/fasyankes?unit=1610003) pada 22 Mei 2020.

